

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan suatu aset yang berharga bagi suatu organisasi. Menurut Sutrisno (2014:3) “sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akan perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya , dan karya rasio, rasa dan karsa”. sedangkan Wirawan (2015:18) mengemukakan bahwa “sumber daya manusia adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja bekerja untuk organisasi”. sumber daya manusia adalah suatu organisasi dituntut untuk memiliki kemampuan dan menghadapi segala tantangan yang di dapatkan selama kegiatan dalam pekerjaannya, sehingga dapat menunjukkan kinerja yang dimilikinya.

Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Dikatakan oleh susanto dalam tangkilisan (201 5:189) bahwa aset organisasi yang paling penting dan harus diperhatikan oleh manajemen adalah manusia (sumber daya manusia atau human resource). Hal ini bermuara pada kenyataan bahwa manusia merupakan elemen yang selalu ada setiap organisasi, yang membuat tujuan-tujuan, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama, yaitu para pegawai negeri sipil daerah (PNSD) yang terlibat dalam aktivitas tersebut mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. (Yuliani, et al, 2010).

Kompetensi sumber daya manusia terdiri dari 5 (Lima) karakteristik yaitu:

1. Knowledge

Informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan (knowledge) merupakan kompetensi yang kompleks. pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisien perusahaan. Namun bagi pegawai yang belum mempunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat. Pemborosan bahan, waktu dan tenaga serta faktor yang produksi yang lain akan diperbuat oleh pegawai berpengetahuan kurang, pemborosan ini akan mempertinggi biaya dalam pencapaian tujuan organisasi.

2. Skills

Adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Dengan mengetahui tingkat kompetensi maka perencanaan sumber daya manusia akan lebih baik hasilnya.

3. Self-Concept

Adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang, sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang dimiliki seseorang dan apa yang menarik bagi seseorang untuk melakukan sesuatu.

4. Traits

Adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Sebagai contoh seperti percaya diri, kontrol diri, ketabahan atau daya tahan.

5. Motives

Adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berperilaku sehingga ia melakukan tindakan. Spences (1993) menambah bahwa motivasi adalah “drive, direct and select behavior toward certain or goals and away from others”. misalnya seseorang yang memiliki motivasi berprestasi secara konsisten mengembangkan tujuan-tujuan yang memberikan sesuatu tantangan pada dirinya sendiri dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut serta mengharapkan semacam “*feedback*” untuk memperbaiki dirinya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka organisasi pemerintah harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi, misalnya sumber daya manusia nya harus berlatar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan yang baik, sehingga, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi akurat, efisien karena dikelola oleh sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.

2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP, Sistem Akuntansi Pemerintah adalah “serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pelaporan posisi keuangan, pengikhtisaran pencatatan, dan operasi keuangan pemerintah”. Sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Suatu sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu software data yang lebih terpenting lagi adalah orang.

komponen utama sistem teknologi informasi berupa:

1. Perangkat Keras (Hardware)
2. Perangkat Lunak (Software)
3. Orang (Brainware)

Komputer sebagai bagian dari teknologi informasi membawa perubahan besar bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Proses perubahan cara kerja manual ke dalam sistem yang terkomputerisasi diharapkan akan membuat pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga kinerja organisasi secara keseluruhan dapat meningkat. Teknologi meliputi komputer (mainframe, mini, micro) perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet, electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi).

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun pemerintah dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

2.1.3 Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern meliputi 5 (lima):

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian risiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi, dan
- e. Pemantauan.

Menurut penelitian Noviyanti, (2014) dan Winidyanigrum (2010), pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan atau ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi titik kompeten. Indriasari dan Ertambang (2007) menyatakan bahwa penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern. Pengendalian intern yang baik akan mampu mencegah kesalahan dan kecurangan dalam

penyusunan laporan keuangan sehingga semakin baik tingkat pengendalian intern akan semakin tinggi tingkat keterandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik suatu pemikiran logis bahwa penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan.

2.1.4 Laporan Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2012:7), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pelaporan entitas adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

1. Pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah
3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat
4. Suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/d daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan.

Menurut penelitian Deddi Nordiawan, 2010, laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK (badan pemeriksa keuangan) harus disampaikan kepada DPR (dewan perwakilan rakyat) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Demikian pula laporan keuangan pemda (LKPD) yang telah diperiksa oleh BPK (badan pemeriksa keuangan) harus disampaikan kepada DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Sistem penyusunan laporan pemerintah terdiri dari kas basis kas (*cash base*). basis akrual (*accrual basis*) dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-

transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintah

2.1.4.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan pembuatan laporan keuangan yaitu memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan laporan keuangan pemerintah menurut Mardiasmo (2009:159) secara umum adalah sebagai berikut:

1. Keputusan dan pengelolaan
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif
3. Perencanaan dan informasi otorisasi
4. Kelangsungan organisasi
5. Hubungan masyarakat
6. Sumber data dan gambaran

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyajikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyajikan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyajikan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.4.3 Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010, komponen laporan keuangan sebagai berikut: komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri

dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Neraca adalah suatu daftar yang disusun secara sistematis memuat tentang aset lancar, aset tetap dan penyusutannya, kewajiban serta modal yang bertujuan untuk menentukan posisi keuangan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Palembang.

2.1.4.4. Fungsi Pelaporan Keuangan

Jika fungsi pelaporan keuangan efektif maka semua yang relevan harus disajikan secara tidak bias, dapat dipahami, dan tepat pada waktunya. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Berdasarkan peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010, laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagian dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akuntabilitas penyusutan dan perubahan nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan tahun Penelitian	Judul	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
1.	Yosefrinaldi 2013	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan	X ₁ (pengaruh kapasitas sumber daya manusia	Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan

		Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat)	X ₂ (pemanfaatan Teknologi Informasi) Y (kualitas Laporan Keuangan)	teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Fadila ariesta (2013)	Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten pasaman barat)	X ₁ (kualitas sumber daya manusia) X ₂ (pemanfaatan teknologi informasi) X ₃ (pengendalian intern akuntansi) Y (keuangan pemerintah daerah)	Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh yang signifikan terhadap keterandalan. Pada pengujian kedua di dapatkan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu.

3.	Situ soimah (2014)	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara	X ₁ (kapasitas sumber daya manusia) X ₂ (pemanfaatan teknologi informasi) X ₃ (sistem pengendalian intern) Y (kualitas laporan keuangan)	Kapasitas sumber daya manusia pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten bengkulu utara
4.	Zuliarti (2012)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalain Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus.	X ₁ (kapasitas sumber daya manusia) X ₂ (pemanfaatan teknologi informasi) X ₃ (pengendalian intern) Y (pelaporan keuangan pemerintah daerah)	kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan kuangan pemerintah daerah. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif

				signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5.	Kadek Hengki Primayana (2014)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	X₁ (kapasitas sumber daya manusia) X₂ (sistem pengendalian intern) X₃ (pemanfaatan teknologi informasi) X₄ (pengawasan keuangan daerah) Y (keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah)	Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap meningkatnya keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pengendalian intern akuntansi berpengaruh meningkatnya keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi juga
6.	I Gede Agus Yudianta dan Ni Made Adi Irwati (2012)	Pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan	X₁ (sumber daya manusia) X₂ (teknologi informasi) X₃ (pengendalian intern)	Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi

			Y (kualitas laporan keuangan	pada pelaporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten Gianyar dengan tingkat keyakinan 95 persen
7.	Zuliarti (2012)	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah kabupaten kudos	X₁ (kapasitas sumber daya manusia) X₂ (pemanfaatan teknologi informasi) X₃ (pengendalian intern akuntansi) Y (nilai informasi pelaporan keuangan)	Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah
8.	Devy roviyantie (2011)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem	X ₁ (kompetensi sumber daya manusia)	Sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan

		akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.	X ₂ (penerapan sistem akuntansi keuangan) Y (kualitas laporan keuangan)	berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan
9.	Farizia choirunisah (2008)	Pengaruh SDM terhadap kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja pemerintah	X ₁ (pengaruh SDM) Y (kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja pemerintah)	Sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan
10	Celviana winidyananin grum & rahmawati (2010)	Pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi (studi empiris di pemda subosukawonosreten)	X ₁ (sumber daya manusia) X ₂ (pemanfaatan teknologi informasi) Y (keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah)	Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sumber: data yang diolah 2021

2.3 Kerangka Pemikiran

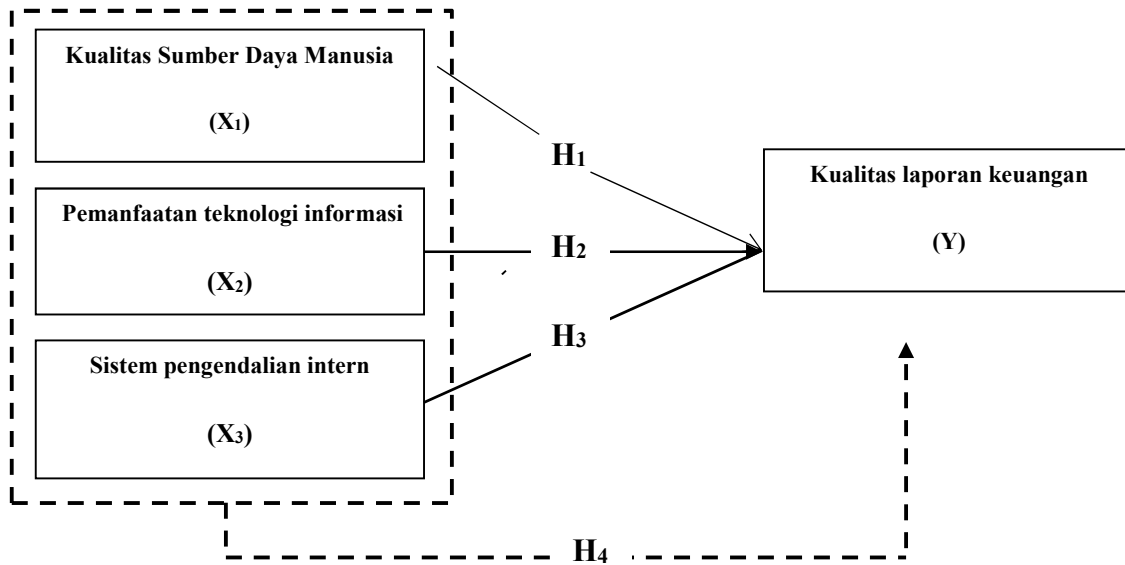
Peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Palembang.

Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk kinerja tinggi dalam menyelesaikan kerjanya. Aparatur pemerintah daerah yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan aparatur pemerintah daerah maka waktu pembuatan laporan akan dapat dihemat. Hal ini karena aparatur pemerintah daerah tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman hal-hal yang harus disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002:146).

Sukmaningrum (2012), “Sistem Pengendalian Intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah”. pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen risiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Jadi, penerapan sistem pengendalian intern yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.

Mustafa (2011), adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pada laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi.

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dalam penilaian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data yang diolah, 2021.

Keterangan:

- > : Menunjukkan secara parsial
 - - - - -> : Menunjukkan secara simultan

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang diteliti Uma Sekaran dalam Sugiyono (2016 , halaman 60) mengemukakan bahwa, kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Sedangkan menurut Suruasumantri dalam Sugiyono (2016, halaman 60) yang mengatakan bahwa, kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2019:95) hipotesis adalah:

“jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian yang akan diteliti yaitu menguji apakah kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Palembang.

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Aparatur pemerintah daerah yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan aparatur pemerintah daerah maka waktu pembuatan laporan akan dapat dihemat. Hal ini karena aparatur pemerintah daerah tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman hal-hal yang harus disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan Menurut Mardiasmo (2002:146).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh, Menurut Penelitian Lisa (2017) yang mengatakan bahwa meningkatnya sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan maka akan semakin meningkat kualitas laporan keuangan, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Shinta Sukmaningtyas (2017) yang mengatakan bahwa rendahnya tingkat pemahaman akuntansi oleh pegawai juga berdampak pada keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan sehingga tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Penelitian Noprial (2015) yang mengemukakan bahwa dalam penelitian ini manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan, ini berarti apabila sumberdaya manusia dikelola dengan baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas sehingga pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan menjadi semakin baik.

H₁: Diduga ada pengaruh kualitas sumber daya manusia secara positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan secara parsial.

2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Aparatur pemerintah daerah yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan aparatur pemerintah daerah maka waktu pembuatan laporan akan dapat dihemat. Hal ini karena aparatur pemerintah daerah tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman hal-hal yang harus disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002:146).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh, Menurut Penelitian Lisa (2017) yang mengatakan bahwa meningkatnya sumber daya manusia dalam

penyusunan laporan keuangan maka akan semakin meningkat kualitas laporan keuangan, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Shinta Sukmaningtyas (2017) yang mengatakan bahwa rendahnya tingkat pemahaman akuntansi oleh pegawai juga berdampak pada keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan sehingga tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut penelitian Noprial (2015) yang mengemukakan bahwa dalam penelitian ini manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan, ini berarti apabila sumberdaya manusia dikelola dengan baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas sehingga pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan menjadi semakin baik.

H₂: Diduga ada pengaruh sistem pengendalian intern secara positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan secara parsial.

2.4.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP, Sistem Akuntansi Pemerintah adalah “serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pelaporan posisi keuangan, pengikhtisaran pencatatan, dan operasi keuangan pemerintah”. Sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi.

Komputer sebagai bagian dari teknologi informasi membawa perubahan besar bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Proses perubahan cara kerja manual ke dalam sistem yang terkomputerisasi diharapkan akan membuat pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga kinerja organisasi secara keseluruhan dapat meningkat. Teknologi meliputi komputer (mainframe, mini, micro) perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet, electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi).

H₃: Diduga ada pengaruh pemanfaatan teknologi informasi secara positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan secara parsial.